



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA T.A 2025



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI**

**JL. TUANKU TAMBUSAI KEL. BAGAN BESAR TELP. 0765 4300011
FAX 0765 440226 KODE POS 28882
DUMAI**

Perubahan Renja
Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada RKPD Kota Dumai Tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2021-2026. Renja Perubahan ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2025.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan 2025 ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Renja dimasa yang akan datang.

Dumai, 01 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

HADIYONO,S.Hut,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710605 199903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi.....	ii	
Daftar Tabel.....	iii	
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian IKU Sampai Dengan Triwulan II	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	44
BAB III	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Dumai	48
	3.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	49
BAB IV	Penutup.....	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	74
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	11
Tabel 2.2	42
Table 3.1	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini dibuat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Penyusunan Perubahan Renja PD merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis PD (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Dengan kata lain Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD hingga triwulan II tahun berjalan, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sepenuhnya tercantum pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Dumai selanjutnya menjadi dasar perumusan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam jangka waktu 1

(satu) tahun yaitu tahun 2025. Sekretariat DPRD Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam Perubahan KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;

2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Nomor 10)

11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 ini antara lain adalah:

a. Maksud

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 disusun dengan maksud agar tersedia dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kota Dumai setelah mendapat penambahan/pengurangan dari Renja Tahun 2025 yang sudah dibuat.

b. Tujuan

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar bagian, antar fungsi maupun antar Perangkat Daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien efektif dan berkelanjutan;
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur;
5. Pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2024 mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

**BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD
KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai yang diusulkan pada tahun 2025 adalah 2 (dua) program yang terdiri dari 18 kegiatan dan Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. 1. Tingkat penyerapan anggaran program dan kegiatan untuk Tahun 2025 sampai dengan triwulan II (Akhir Bulan Juni 2025) adalah sebesar 45,23%
2. Dalam sebuah program dan kegiatan, serapan anggaran menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran yang telah disiapkan. Dengan persentase serapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar **45,23 %**, dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan tersebut belum tercapai secara optimal dalam hal penggunaan anggaran yang telah disiapkan. Pencapaian persentase serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran memang telah dilakukan secara efektif dan efisien. Seluruh

anggaran yang telah disiapkan telah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, evaluasi terhadap serapan anggaran perlu dilakukan guna memastikan bahwa tidak terdapat penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. Evaluasi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kinerja dalam penggunaan anggaran di masa depan. Dalam melakukan evaluasi serapan anggaran, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti akuntabilitas penggunaan anggaran, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan melakukan evaluasi yang tepat, dapat ditemukan peluang untuk meningkatkan kinerja dalam penggunaan anggaran di masa yang akan datang.

Berikut evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I Sekretariat DPRD Kota Dumai,

Pada tahun 2025, Anggaran Belanja pada APBD Murni Sekretariat DPRD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **64.433.630.686,-**

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh ASN yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, hal ini disebabkan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan tujuan Sekretariat DPRD yaitu “Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)” dengan sasaran DPRD yaitu “Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)” maka Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

DPRD adalah Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT, Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD.

Dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II ini maka capaian IKU Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai
s/d Triwulan II Tahun 2025

Sekretariat DPRD Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)	
					I		II		9 = I + II + III + IV		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN			111.681.648.163,00		12.656.505.526,00		13.119.500.647,86		25.776.006.173,86				79.555.933.482,12		
4.02.4.02.001.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah (Mengikuti RPJMD)	%	85.830.244.963,00	12,31	10.562.328.944,00	11,37	9.761.535.752,86	23,68	20.323.864.696,86	23,68%	23,68%	123,68	60.922.292.510,12	12,36%	84,07%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	350.000.000,00	0,00	0,00	5,51	19.281.875,00	5,51	19.281.875,00	5,51 %	5,51 %	105,51	144.807.675,00	105,51 %	41,37 %
4.02.4.02.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3 Dokumen)	Dokumen	50.000.000	-		9,30	4.651.250	9,30	4.651.250,00	310,08%	9,30 %	12,30	14.149.250,00	410,08 %	28,30 %
4.02.4.02.001.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2 Dokumen)	Dokumen	50.000.000	-		6,32	3.159.375	6,32	3.159.375,00	315,94%	6,32 %	8,32	12.979.375,00	415,94 %	25,96 %
4.02.4.02.001.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	50.000.000	-	-	-		-	-	0,00 %	0,00 %	2,00	7.364.000,00	100,00 %	14,73 %

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		Perubahan RKA-SKPD (2 Dokumen)														
4.02.4.02.0001.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (2 Dokumen)	Dokumen	50.000.000	-		6,55	3.272.500	6,55	3.272.500,00	327,25%	6,55%	8,55	27.709.900,00	427,25%	55,42%
4.02.4.02.0001.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (2 Dokumen)	Dokumen	50.000.000	-		6,55	3.272.500	6,55	3.272.500,00	327,25%	6,55%	8,55	27.613.400,00	427,25%	55,23%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.001.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 Laporan)	Laporan	50.000.000	-		5,60	2.800.000	5,60	2.800.000,00	140,00%	5,60%	9,60	27.266.000,00	240,00%	54,53%
4.02.4.02.0.001.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Laporan)	Laporan	50.000.000	-		4,25	2.126.250	4,25	2.126.250,00	425,25%	4,25%	5,25	27.725.750,00	525,25%	55,45%
4.02.4.02.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah	%	7.667.387.995,00	15,20	1.165.631.051,00	15,08	1.156.082.733,00	30,28	2.321.713.784,00	30,28%	30,28%	130,28	7.481.270.488,00	130,28%	106,34%
4.02.4.02.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	7.507.387.995	15,53	1.165.631.051	15,33	1.150.695.549	30,85	2.316.326.600,00	68,56%	30,85%	75,85	7.425.357.304,00	168,56%	108,00%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		ASN (45 Orang/bulan)														
4.02.4.02.0001.2.02.02.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Melaksanakan penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD (1 Dokumen)	Dokumen	40.000.000	-		4,28	1.713.592	4,28	1.713.592,00	428,40%	4,28%	4,28	1.713.592,00	428,40%	4,28%
4.02.4.02.0001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2 Laporan)	Laporan	40.000.000	-		4,90	1.960.000	4,90	1.960.000,00	245,00%	4,90%	6,90	27.276.800,00	345,00%	68,19%
4.02.4.02.0001.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD (7 Laporan)	Laporan	40.000.000	-		4,28	1.713.592	4,28	1.713.592,00	61,20%	4,28%	4,28	1.713.592,00	61,20%	4,28%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

	SKPD															
4.02.4.02.001.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1 Dokumen)	Dokumen	40.000.000	-		-		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1,00	25.209.200,00	10,00 %	63,02 %
4.02.4.02.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	100,00	38.423.000,00	10,00 %	43,35 %
4.02.4.02.001.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (2 Dokumen)	Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-	-	0,00 %	0,00 %
4.02.4.02.001.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SPKD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (1 Dokumen)	Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1,00	23.943.000,00	10,00 %	95,77 %

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.001.2.03.03.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (1 Laporan)	Laporan	13.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-	-	0,00 %	0,00 %
4.02.4.02.0.001.2.03.04.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (2 Laporan)	Laporan	13.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-	-	0,00 %	0,00 %
4.02.4.02.0.001.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2 Laporan)	Laporan	15.000.000	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2,00	14.480.000,00	100,00 %	96,53 %
4.02.4.02.0.001.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian pada perangkat	%	777.500.000,00	8,10	63.000.000,00	4,27	33.168.448,00	12,37	96.168.448,00	12,37 %	12,37 %	112,37	235.168.448,00	112,37 %	35,64 %

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		daerah														
4.02.4.02.0.001.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (1 Dokumen)	Dokumen	50.000.000					#REF!	0,00						
4.02.4.02.0.001.2.05.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (1 Dokumen)	Dokumen	67.500.000	-		49,14	33.168.448,00	49,14	33.168.448,00	4913,84%	49,14%	49,14	33.168.448,00	4913,84%	49,14%
4.02.4.02.0.001.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (1 Dokumen)	Dokumen	25.000.000												
4.02.4.02.0.001.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	300.000.000	-	-	-		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

	Tugas dan Fungsi	mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (10 Orang)														
4.02.4.02.0001.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (86 Orang)	Orang	335.000.000	18,81	63.000.000,00	-	-	18,81	63.000.000,00	21,87%	18,81%	48,81	202.000.000,00	56,75%	80,80%
4.02.4.02.0001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan administrasi umum pada perangkat daerah	%	30.858.053.042,00	7,77	2.398.356.690,00	10,89	3.360.032.354,00	18,66	5.758.389.044,00	18,66%	18,66%	118,66	15.643.678.480,00	118,66%	60,12%
4.02.4.02.0001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (12 Paket)	Paket	228.375.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,00	190.870.970,00	100,00%	95,44%
4.02.4.02.0001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	275.000.000	0,00	-	18,42	50.666.840	18,42	50.666.840,00	153,54%	18,42%	30,42	266.196.998,00	253,54%	106,48%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (12 Paket)	Paket	210.000.000	0,00	-	25,11	52.740.596	25,11	52.740.596,00	209,29%	25,11%	37,11	234.443.383,00	309,29%	117,22%
4.02.4.02.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (12 Paket)	Paket	300.000.000	16,17	48.520.320,00	18,28	54.845.878	34,46	103.366.198,00	287,13%	34,46%	46,46	300.095.776,00	387,13%	107,18%
4.02.4.02.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (12 Paket)	Paket	250.000.000	0,00	-	10,38	25.957.295	10,38	25.957.295,00	86,52%	10,38%	22,38	234.474.938,00	186,52%	97,13%
4.02.4.02.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (1 Dokumen)	Dokumen	100.000.000	0,00	-	13,89	13.888.000	13,89	13.888.000,00	138,80%	13,89%	14,89	54.140.000,00	1488,80%	54,14%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.001.2.06.07.	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (5 Paket)	Paket	38.500.000	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1,00	32.439.750,00	20,00%	92,69%
4.02.4.02.001.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (1 Laporan)	Laporan	300.000.000	5,96	17.890.980,00	11,23	33.700.350	17,20	51.591.330,00	171,971 %	17,20%	18,20	250.110.833,00	1819,71%	83,37%
4.02.4.02.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 Laporan)	Laporan	29.156.178.042	8,00	2.331.945.390	10,73	3.128.233.395	18,73	5.460.178.785,00	187,273 %	18,73%	19,73	14.080.905.832,00	1972,73%	57,67%
4.02.4.02.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	8.025.051.000,00	0,00	-	2,02	162.131.900,00	2,02	162.131.900,00	2,02 %	2,02 %	102,02	2.075.214.260,00	102,02 %	56,09%
4.02.4.02.001.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	566.301.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1,00	125.160.000,00	25,00%	16,69%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.001.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jabatan yang Disediakan (4 Unit) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (0 Unit)	Unit	-	#DIV /0!		#DIV /0!		#DIV /0!	0,00	0,00 %	0,00 %	#DIV /0!	39.307.000,00	0,00 %	0,00 %
4.02.4.02.0.001.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (150 Unit)	Unit	1.000.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-	161.427.200,00	0,00 %	16,14 %
4.02.4.02.0.001.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (30 Unit)	Unit	3.860.730.022	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	25,00	948.663.000,00	50,00 %	79,06 %
4.02.4.02.0.001.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (1 Unit)	Unit	2.048.019.978												

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.001.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (1 Unit)	Unit	100.000.000	0,00		162,13	162.131.900,00	162,13	162.131.900,00	#### ####	162,13%	163,13	334.571.810,00	16313,19%	66,91%
4.02.4.02.0.001.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (2 Unit)	Unit	450.000.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	466.085.250,00	50,00%	186,43%
4.02.4.02.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	3.694.965.780,00	15,52	573.516.888,00	0,20	729.887.930,00	15,72	1.303.404.818,00	15,72%	35,28%	115,72	3.607.628.943,00	115,72%	114,23%
4.02.4.02.0.001.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	Laporan	25.750.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	20.000.000,00	100,00%	197,24%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		(1 Laporan)														
4.02.4.02.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1 Laporan)	Laporan	750.000.000	7,54	56.566.888	14,51	108.827.060	22,05	165.393.948,00	220,525%	22,05%	23,05	525.980.613,00	23,0525%	109,58%
4.02.4.02.001.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (7 Laporan)	Laporan	50.000.000	-		2,08	1.040.000	2,08	1.040.000,00	208,00%	2,08%	3,08	59.930.000,00	30,80%	119,86%
4.02.4.02.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (5 Laporan)	Laporan	2.869.215,780	18,02	516.950,00	21,61	620.020,870	39,63	1.136.970,870,00	660,44%	39,63%	44,63	3.001.718,330,00	74,378%	114,65%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02 .001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah dokumen laporan pemelihara an barang milik daerah penunjang urusan pemerintah an daerah	%	5.663.699. 000,00	7,97	451.552.9 86,00	7,63	431.970.4 30,86	15,60	883.523.41 6,86	15,6 0%	15, 60%	115, 60	3.557.031.0 56,12	11 5,60 %	139 ,78 %
4.02.4.02. 0.001.2.09. 01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (5 unit)	Unit	300.000.00 0	0,00		2,67	8.000.000	2,67	8.000.000,0 0	53,3 3%	2,67 %	3,67	37.944.000,0 0	73, 33%	94,8 6%
4.02.4.02. 0.001.2.09. 02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (10 unit)	Unit	650.000.00 0	0,96	6.237.561	6,88	44.711.65 7	7,84	50.949.218, 00	78,3 8%	7,84 %	15,84	323.771.492, 00	15 8,38 %	117, 74%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.001.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (25 unit)	Unit	25.000.000	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	-	-	0,00 %	0,00 %
4.02.4.02.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (200 Unit)	Unit	400.000.000	0,00		7,06	28.242.594	7,06	28.242.594,00	7,06 %	7,06 %	67,06	163.198.054,00	67,06 %	54,40 %
4.02.4.02.0.001.2.09.07.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (1 Unit)	Unit	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	0,00 %	0,00 %	#DIV/0!	-	0,00 %	0,00 %
4.02.4.02.0.001.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (1 Unit)	Unit	3.438.699.000	12,95	445.315.425	5,72	196.663.142	18,67	641.978.566,96	186,92 %	18,67 %	19,67	1.844.723.522,22	196,92 %	151,24 %
4.02.4.02.0.001.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (1 Unit)	Unit	500.000.000	0,00		30,87	154.353.038	30,87	154.353.037,90	308,70 %	30,87 %	31,87	504.300.987,90	318,70 %	144,09 %

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.001.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (10 Unit)	Unit	350.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00	683.093.000,00	40,00%	207,00%
4.02.4.02.0.001.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah dokumen laporan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	27.495.409.306,00	21,50	5.910.271.329,00	12,90	3.547.222.588,00	34,40	9.457.493.917,00	34,40%	34,40%	134,40	27.342.489.316,00	134,40%	99,23%
4.02.4.02.0.001.2.15.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (35 Orang/bulan)	Orang	26.145.409.306	22,61	5.910.271.329	13,57	3.547.222.588	36,17	9.457.493.917,00	103,35%	36,17%	66,17	26.497.531.816,00	189,06%	101,35%
4.02.4.02.0.001.2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (5 Paket)	Paket	900.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,00	572.497.500,00	100,00%	47,71%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0001.2.15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (35 Orang)	Orang	450.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	23,00	272.460.000,00	65,71%	129,74%
4.02.4.02.0001.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen laporan layanan administrasi DPRD	%	1.217.178.840,00	0,00	-	26,43	321.757.494,00	26,43	321.757.494,00	26,43%	26,43%	126,43	796.580.844,00	12,64%	59,01%
4.02.4.02.0001.2.16.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (5 Dokumen)	Dokumen	797.178.840	0,00		40,36	321.757.494	40,36	321.757.494,00	672,70%	40,36%	45,36	796.580.844,00	75,60%	66,38%
4.02.4.02.0001.2.16.02.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (6 Laporan)	Laporan	160.000.000	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.4.02.0001.2.16.03.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (1 Laporan)	Laporan	130.000.000	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.001.2.16.04.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (1 Paket)	Paket	130.000.000	0,00	-	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.4.02.0.002.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	25.851.403.200,00	8,10	2.094.176.582,00	12,99	3.357.964.895,00	21,09	5.452.141.477,00	21,09%	21,09%	121,09	18.633.640.972,00	121,09%	66,91%
4.02.4.02.0.002.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen laporan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	%	3.654.176.000,00	0,00	0,00	5,61	205.022.600,00	5,61	205.022.600,00	5,61%	5,61%	105,61	1.812.056.069,00	105,61%	46,33%
4.02.4.02.0.002.2.01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (5 Dokumen)	Dokumen	2.067.000.000	-		2,64	54.482.700	2,64	54.482.700,00	52,72%	2,64%	6,64	768.612.990,00	132,72%	37,18%
4.02.4.02.0.002.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	Dokumen	649.000.000	-		12,00	77.892.100	12,00	77.892.100,00	20,03%	12,00%	15,00	464.394.900,00	25,03%	71,56%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		n Rancangan Peraturan Daerah (6 Dokumen)														
4.02.4.02.0.002.2.01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (5 Dokumen)	Dokumen	300.000.000	-		21,63	64.877.800	21,63	64.877.800,00	432,52%	21,63%	26,63	198.254.179,00	53,25%	66,08%
4.02.4.02.0.002.2.01.04.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan dan/atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (5 Dokumen)	Dokumen	485.000.000	-		1,60	7.770.000	1,60	7.770.000,00	40,05%	1,60%	5,60	380.794.000,00	14,05%	78,51%
4.02.4.02.0.002.2.01.05.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (1 Dokumen)	Dokumen	103.176.000	-		-		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.4.02.0.002.2.01.06.	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang	Orang	50.000.000	-		-		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

	Daerah	Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (50 Orang)														
4.02.4.02.002.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen laporan pembahasan kebijakan anggaran	%	1.489.390.000,00	0,00	0,00	7,33	109.230.541,00	7,33	109.230.541,00	7,33 %	7,33 %	107,33	1.516.667.051,00	107,33 %	104,17 %
4.02.4.02.002.2.02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1 Dokumen)	Dokumen	100.000.000	-		9,17	9.167.700	9,17	9.167.700,00	916,77%	9,17 %	10,17	93.090.002,00	1016,77%	93,09%
4.02.4.02.002.2.02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 Dokumen)	Dokumen	180.000.000	-		-		0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1,00	177.139.360,00	100,00 %	98,41%
4.02.4.02.002.2.02.03.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dokumen)	Dokumen	304.000.000	-		1,96	5.967.186	1,96	5.967.186,00	196,29%	1,96 %	2,96	302.467.934,00	296,29 %	99,50%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.002.2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dokumen)	Dokumen	235.000.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	233.636.397,00	100,00%	99,42%	
4.02.4.02.0.002.2.02.05.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (2 Dokumen)	Dokumen	160.000.000	-	18,04	28.863.055	18,04	28.863.055,00	901,97%	18,04%	20,04	186.201.795,00	1001,97%	116,38%	
4.02.4.02.0.002.2.02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (1 Dokumen)	Dokumen	510.390.000	-	12,78	65.232.600	12,78	65.232.600,00	1278,09%	12,78%	13,78	524.131.563,00	1378,09%	109,88%	
4.02.4.02.0.002.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	1.215.750.000,00	0,51	6.160.000,00	6,87	83.461.800,00	7,37	89.621.800,00	7,37%	7,37%	107,37	548.176.377,00	107,37%	47,61%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.002.2.03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum (1 Laporan)	Laporan	70.000.000	0,80	560.000	20,15	14.102.500	20,95	14.662.500,00	209,46%	20,95%	21,95	57.053.200,00	2194,64%	81,50%
4.02.4.02.0.002.2.03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (1 Laporan)	Laporan	70.000.000	0,80	560.000	24,59	17.215.700	25,39	17.775.700,00	253,93%	25,39%	26,39	31.497.700,00	2639,39%	45,00%
4.02.4.02.0.002.2.03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (1 Laporan)	Laporan	70.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	17.192.800,00	100,00%	24,56%
4.02.4.02.0.002.2.03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (1 Laporan)	Laporan	70.000.000	0,00		8,37	5.860.000	8,37	5.860.000,00	837,14%	8,37%	9,37	21.952.800,00	937,14%	31,36%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		Laporan)														
4.02.4.02.0.002.2.03.05.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (1 Laporan)	Laporan	70.000.000	0,00		12,85	8.994.000	12,85	8.994.000,00	128,486%	12,85%	13,85	40.021.100,00	1384,86%	57,17%
4.02.4.02.0.002.2.03.06.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (1 Dokumen)	Dokumen	96.300.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	71.473.500,00	100,00%	79,42%
4.02.4.02.0.002.2.03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (1 Dokumen)	Dokumen	90.000.000	5,60	5.040.000	16,82	15.139.600	22,42	20.179.600,00	224,218%	22,42%	23,42	63.590.280,00	2342,18%	83,34%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.002.2.03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (1 Dokumen)	Dokumen	679.450.000	0,00		3,26	22.150.000	3,26	22.150.000,00	326,00%	3,26%	4,26	245.394.997,00	426,00%	38,64%
4.02.4.02.0.002.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitas DPRD	%	4.687.850.800,00	12,09	566.833.811,00	9,51	445.937.992,00	21,60	1.012.771.873,00	21,60%	21,60%	121,60	2.260.601.206,00	121,60%	46,24%
4.02.4.02.0.002.2.04.01.	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (1 Dokumen)	Dokumen	183.797.900,00	100,00	183.797.900,00										
4.02.4.02.0.002.2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (4 Dokumen)	Dokumen	3.612.850.800	9,44	341.035.981	7,87	284.350.192	17,31	625.386.173,00	432,75%	17,31%	21,31	1.441.354.586,00	532,75%	41,47%
4.02.4.02.0.002.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (6 orang)	Orang	145.000.000	0,00		30,08	43.619.400	30,08	43.619.400,00	188,01%	30,08%	46,08	73.631.820,00	288,01%	10,52%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.002.2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (12 orang)	Orang	480.000.000	8,75	42.000.000	17,19	82.500.000	25,94	124.500.000,00	162,11%	25,94%	39,94	526.348.500,00	249,61%	395,68%
4.02.4.02.0.002.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (1 Dokumen)	Dokumen	50.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.4.02.0.002.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (1 Dokumen)	Dokumen	50.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.4.02.0.002.2.04.08.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (1 Dokumen)	Dokumen	350.000.000	0,00		10,13	35.468.400	10,13	35.468.400,00	101,338%	10,13%	10,13	35.468.400,00	101,338%	70,94%
4.02.4.02.0.002.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%	5.222.392.000,00	18,10	945.000.000,00	19,35	1.010.773.710,00	37,45	1.955.773.710,00	37,45%	37,45%	137,45	4.990.724.765,00	137,45%	106,49%
4.02.4.02.0.002.2.05.01.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan	Laporan	25.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		Kerja DPRD (1 Laporan)														
4.02.4.02.0.002.2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 dokumen)	Dokumen	550.000.000	0,00		11,22	61.695.510	11,22	61.695.510,00	112,174%	11,22%	12,22	410.931.388,00	12,21,74%	78,63%
4.02.4.02.0.002.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (3 Dokumen)	Dokumen	4.577.392.000	20,64	945.000.000	20,73	949.078.200	41,38	1.894.078.200,00	137,930%	41,38%	44,38	4.579.793.377,00	14,79,30%	112,01%
4.02.4.02.0.002.2.05.04.	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (50 Orang)	Orang	70.000.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.4.02.0.002.2.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	%	57.619.400,00	0,00	0,00	141,49	81.524.400,00	141,49	81.524.400,00	141,49%	141,49%	241,49	216.502.191,00	24,1,49%	40,85%
4.02.4.02.0.002.2.06.01.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (1 Dokumen)	Dokumen	57.619.400	0,00		100,00	57.619.400	100,00	57.619.400,00	####	100,00%	101,00	192.597.191,00	10,100,00%	36,34%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.4.02.0.002.2.06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (1 Laporan)	Laporan	567.100.000	0,00		4,22	23.905.000	4,22	23.905.000,00	421,53%	4,22%	5,22	158.882.791,00	521,53%	29,98%
4.02.4.02.0.002.2.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen laporan pembahasan kerja sama daerah	%	603.975.000,00	33,05	199.600.000,00	11,61	70.132.000,00	44,66	269.732.000,00	44,66%	44,66%	144,66	990.448.968,00	144,66%	78,92%
4.02.4.02.0.002.2.07.01.	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (1 Dokumen)	Dokumen	23.975.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.4.02.0.002.2.07.02.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (1 Dokumen)	Dokumen	580.000.000	34,41	199.600.000	12,09	70.132.000	46,51	269.732.000,00	465,05%	46,51%	47,51	990.448.968,00	475,05%	80,52%
4.02.4.02.0.002.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen laporan fasilitasi	%	8.920.250.000,00	4,22	376.582.701,00	15,16	1.351.881.852,00	19,38	1.728.464.553,00	19,38%	19,38%	119,38	6.298.464.345,00	119,38%	63,18%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		tugas DPRD														
4.02.4.02.0002.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (3 Dokumen)	Dokumen	3.331.250.000	0,00		25,12	836.925.206	25,12	836.925.206,00	837,45%	25,12%	28,12	1.960.799.950,00	937,45%	60,33%
4.02.4.02.0002.2.08.02.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (1 Laporan)	Laporan	26.400.000	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.4.02.0002.2.08.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (1 Dokumen)	Dokumen	1.385.800.000	0,00		0,04	600.000	0,04	600.000,00	4,33%	0,04%	1,04	228.255.819,00	104,33%	16,88%
4.02.4.02.0002.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (1	Dokumen	1.631.800.000	23,08	376.582.701	29,88	487.586.646	52,96	864.169.347,00	529,58%	52,96%	53,96	1.759.319.609,00	5395,80%	110,51%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

		Dokumen)														
4.02.4.02.0002.2.08.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (5 Dokumen)	Dokumen	2.545.000.000	0,00		1,05	26.770.000	1,05	26.770.000,00	21,04%	1,05%	5,05	2.350.088.967,00	10,04%	62,67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kota Dumai mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Dumai sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Lingkungan kinerja Sekretariat DPRD pada umumnya kental dengan nuansa politik merupakan salah satu kendala dalam menerapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi dan manajerial yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam memaksimalkan elemen penting untuk menunjang kinerja organisasi.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD berkaitan erat dengan reposisi dan refungsional DPRD sebagai Badan Legislatif daerah yang menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Seiring dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundangan-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantif dan sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan hubungan antar lembaga sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dengan demikian, dimasa yang akan datang Sekretariat DPRD Kota Dumai perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh untuk mendukung terciptanya struktur pelayanan yang adaptif, selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan.

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Dumai berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	95	-	-	95	95			
2.	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	-	-	95%	95%			95%	95%	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
3.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/tidak	Ada	ada	-	-	Ada	Ada			
4.	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	%	-	-	85%	85%			85%	85%	
5.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/tidak	Ada	ada	-	-	Ada	Ada			
6.	Persentase Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	%	-	-	95%	95%			95%	95%	
7.	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan	Ada/tidak	Ada	ada	-	-	Ada	Ada			

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
	Dokumen Anggaran Setwan DPRD										
8.	Persentase Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	-	-	95%	95%			95%	95%	

2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Perubahan dan penyesuaian kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Dumai salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab sebagai implementasi asas desentralisasi. Tuntutan adanya peningkatan kemampuan dan kebutuhan profesionalitas aparat yang memiliki kompetensi menjadi hal yang mutlak. Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel . Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian tugas dan fungsi yang tumpang tindih 2. Administrasi baik dibidang sekretariat maupun keuangan kurang terakomodir 3. Pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai belum optimal 4. Informasi sering tidak tersampaikan dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Peluang <i>(Opportunities)</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara 	Menghambat pencapaian visi dan misi kepala daerah	

		<p>demokratis;</p> <p>3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah</p> <p>4) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</p> <p>5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD</p> <p>b. Tantangan / Ancaman (<i>threats</i>)</p> <p>1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintah daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;</p> <p>2) Masih seringnya</p>		
--	--	---	--	--

		<p>terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD</p> <p>3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD</p>		
--	--	---	--	--

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan wewenang DPRD.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terhadap beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

3.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Dumai, maka ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam rencana kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai yakni mencakup 2 program, 18 kegiatan dan 73 sub kegiatan, yang mana program tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) program yaitu sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin yang menunjang urusan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:

1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.2.5 Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.3.1 Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2 Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.3 Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.4 Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.5 Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.4.1 Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4.2 Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.4.3 Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1.4.4 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Kinerja Pegawai

1.4.5 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4.6 Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:

1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.4 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.5 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5.6 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.5.7 Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material

1.5.8 Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.5.9 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.6.1 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.6.2 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3 Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.6.4 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.5 Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.6.6 Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.7 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.8 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.7.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.8.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.8.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3 Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.4 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.5 Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.8.6 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.7 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.8.8 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.9.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 1.9.2 Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 1.9.3 Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 1.10 Layanan Administrasi DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.10.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
 - 1.10.2 Subkegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD

1.10.3 Subkegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

1.10.4 Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan keputusan/Perda yang ditetapkan oleh DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

2.1.1 Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2.1.2 Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2.1.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

2.1.4 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2.1.5 Subkegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD

2.1.6 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

2.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran, kegiatan ini terdiri dari :

2.2.1 Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

- 2.2.2 Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 2.2.3 Subkegiatan Pembahasan APBD
 - 2.2.4 Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 - 2.2.5 Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester
 - 2.2.6 Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan ini terdiri dari :
- 2.3.1 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 2.3.2 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 2.3.3 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 2.3.4 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 2.3.5 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - 2.3.6 Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - 2.3.7 Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - 2.3.8 Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- 2.4.1 Subkegiatan Orientasi DPRD

- 2.4.2 Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD
- 2.4.3 Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 2.4.4 Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 2.4.5 Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 2.4.6 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 2.4.7 Subkegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
- 2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.5.1 Subkegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - 2.5.2 Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 2.5.3 Subkegiatan Pelaksanaan Reses
 - 2.5.4 Subkegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
- 2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.6.1 Subkegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 2.6.2 Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 2.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.7.1 Subkegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 - 2.7.2 Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 2.8 Fasilitasi Tugas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.8.1 Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 2.8.2 Subkegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 2.8.3 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan

Musyawarah

2.8.4 Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2.8.5 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
						SEKRETARIAT DPRD			112.191.128.763,00	64.433.630.685,84	56.368.636.799,87		106.245.174.634,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			112.191.128.763,00	64.433.630.685,84	56.368.636.799,87		106.245.174.634,00		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			112.191.128.763,00	64.433.630.685,84	56.368.636.799,87		106.245.174.634,00		
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	100 %	100 %	85.830.244.963,00	51.141.645.866,84	44.663.507.641,18		77.018.274.414,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	350.000.000,00	193.941.250,00	193.941.250,00		330.000.000,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	21.885.000,00	8.411.250,00		40.000.000,00	
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	27.071.250,00	13.518.287,00		40.000.000,00	

	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	27.340.000,00	13.879.552,00		50.000.000,00	
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	26.319.000,00	3.412.500,00		50.000.000,00	
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	25.911.000,00	3.412.500,00		50.000.000,00	
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	33.874.000,00	21.720.899,20		50.000.000,00	
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	31.541.000,00	20.125.550,80		50.000.000,00	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	5 Dokumen	11 Dokumen	7.667.387.995,00	5.601.956.040,00	5.601.956.040,00		7.667.387.995,00
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	7.507.387.995,00	5.540.906.500,00	5.191.520.760,00		7.507.387.995,00	

4	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan	13.000.000,00	0,00	0,00		13.000.000,00	
4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan	13.000.000,00	0,00	0,00		13.000.000,00	
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	16.603.912,00		15.000.000,00	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	777.500.000,00	333.920.000,00	333.920.000,00	777.500.000,00	
4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00		50.000.000,00	
4	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	67.500.000,00	35.640.000,00	33.168.448,00		67.500.000,00	
4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00		25.000.000,00	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	2 Orang	300.000.000,00	148.280.000,00	13.661.824,00		300.000.000,00	

	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 Orang	4 Orang	335.000.000,00	150.000.000,00	86.527.584,00		335.000.000,00	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	30.858.053.042,00	12.185.591.164,00	12.185.591.164,00		28.374.832.493,00
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	228.375.000,00	105.835.625,00	79.338.650,50		250.000.000,00	
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	275.000.000,00	275.000.000,00	109.876.546,10		210.000.000,00	
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	210.000.000,00	158.578.300,00	99.899.551,00		275.000.000,00	
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	300.000.000,00	214.253.400,00	136.569.673,00		300.000.000,00	
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	137.992.937,25		250.000.000,00	
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	90.000.000,00	62.550.592,00		100.000.000,00	
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	38.500.000,00	35.243.875,00	52.834.562,50		38.500.000,00
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	230.180.616,00	166.544.930,00			300.000.000,00
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	29.156.178.042,00	10.826.499.348,00	7.160.389.480,34			26.651.332.493,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195 Unit	72 Unit	8.025.051.000,00	2.929.367.928,00	2.929.367.928,00		3.550.000.000,00
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	566.301.000,00	0,00	0,00			0,00
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00			0,00
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit	50 Unit	1.000.000.000,00	248.351.308,00	115.650.000,00			1.000.000.000,00
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	20 Unit	3.860.730.022,00	2.495.179.700,00	649.722.000,00			1.500.000.000,00
4	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00			100.000.000,00
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	2.048.019.978,00	0,00	0,00		0,00	
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	235.031.900,00		500.000.000,00	
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	185.836.920,00	70.281.000,00		450.000.000,00	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Laporan	14 Laporan	3.694.965.780,00	3.357.849.780,00	3.357.849.780,00		3.694.965.780,00
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	25.750.000,00	10.500.000,00	5.250.000,00		25.750.000,00	
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	428.400.000,00	580.552.454,94		750.000.000,00	
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	49.734.000,00	62.790.000,00		50.000.000,00	
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	2.869.215.780,00	2.869.215.780,00	2.686.117.912,00		2.869.215.780,00	
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258 Unit	221 Unit	5.663.699.000,00	599.350.000,00	599.350.000,00		3.730.000.000,00

	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	300.000.000,00	76.000.000,00	35.200.000,00		300.000.000,00
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	17 Unit	650.000.000,00	208.330.000,00	105.526.700,00		650.000.000,00
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	0 Unit	25.000.000,00	24.960.000,00	0,00		25.000.000,00
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	400.000.000,00	290.060.000,00	176.470.147,00		400.000.000,00
	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.438.699.000,00	0,00	712.432.166,96		1.500.000.000,00
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	161.243.037,90		500.000.000,00
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00		350.000.000,00	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 Orang	35 Orang	27.495.409.306,00	25.102.490.864,84	25.102.490.864,84		27.595.409.306,00
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	26.145.409.306,00	23.924.584.185,84	23.262.854.014,84		26.145.409.306,00	
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	900.000.000,00	727.906.679,00	1.516.091.679,00		1.000.000.000,00	
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	304.982.400,00		450.000.000,00	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	13 Dokumen	5 Dokumen	1.217.178.840,00	797.178.840,00	797.178.840,00		1.217.178.840,00
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen	797.178.840,00	797.178.840,00	525.497.245,85		797.178.840,00	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	0 Laporan	160.000.000,00	0,00	0,00		160.000.000,00	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	0 Laporan	130.000.000,00	0,00	0,00		130.000.000,00	
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD								

						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	130.000.000,00	0,00	0,00		130.000.000,00
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	95 %	95 %	26.360.883.800,00	13.291.984.819,00	11.705.129.158,69	29.226.900.220,00
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 Dokumen	22 Dokumen	3.654.176.000,00	1.381.214.064,00	1.381.214.064,00	3.654.176.000,00
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2.067.000.000,00	480.000.000,00	284.387.096,00		2.067.000.000,00
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	649.000.000,00	238.276.960,00	185.334.377,57		649.000.000,00
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan							
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	134.511.104,00	67.363.160,88		300.000.000,00
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen	485.000.000,00	425.250.000,00	412.695.000,00		485.000.000,00
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD							
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	103.176.000,00	103.176.000,00	64.903.896,00		103.176.000,00
	4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah							

						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00		50.000.000,00	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 Dokumen	7 Dokumen	1.489.390.000,00	1.430.603.000,00	1.430.603.000,00		1.489.390.000,00
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	73.852.964,00		100.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	120.365.774,40		180.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	304.000.000,00	304.000.000,00	161.618.837,20		304.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00	186.096.000,00	97.537.036,80		235.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	82.905.600,00		160.000.000,00	
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	510.390.000,00	500.507.000,00	296.706.401,60		510.390.000,00	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 Dokumen	8 Dokumen	1.215.750.000,00	666.822.480,00	666.822.480,00		1.270.052.500,00
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum								

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	44.150.000,00	32.973.780,00		70.000.000,00
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	45.344.000,00	28.050.283,20		70.000.000,00
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat							
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	43.878.000,00	23.882.278,40		70.000.000,00
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	47.676.000,00	29.403.308,80		70.000.000,00
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam							
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	43.234.480,00	19.795.955,58		70.000.000,00
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	96.300.000,00	78.380.000,00	41.756.512,00		103.041.000,00
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	58.848.000,00	30.279.142,40		90.000.000,00
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah							

						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	679.450.000,00	305.312.000,00	162.890.041,60		727.011.500,00	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9 Dokumen	6 Dokumen	4.687.850.800,00	1.769.300.000,00	1.769.300.000,00		5.128.172.070,00
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	1 Dokumen	0,00	0,00	183.797.900,00		0,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD								
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	3.612.850.800,00	1.014.300.000,00	1.010.565.421,00		3.703.172.070,00	
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	6 Orang	145.000.000,00	135.000.000,00	150.397.080,00		145.000.000,00	
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang	19 Orang	480.000.000,00	380.000.000,00	373.800.000,00		480.000.000,00	
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00		50.000.000,00	
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD								
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	28.553.872,00		50.000.000,00	
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD								
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	190.000.000,00	97.522.960,00		700.000.000,00	

4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6 Dokumen	4 Dokumen	5.222.392.000,00	3.540.297.000,00	3.540.297.000,00		5.222.392.000,00
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah								
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		1 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00		25.000.000,00
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	522.600.000,00	307.895.926,59		550.000.000,00
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses								
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen	3 Dokumen	4.577.392.000,00	3.017.697.000,00	3.231.691.668,15		4.577.392.000,00
4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah								
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		50 Orang	0 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00		70.000.000,00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	2 Dokumen	567.100.000,00	231.739.200,00	231.739.200,00		664.416.400,00
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD								
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		-	1 Dokumen	0,00	0,00	57.619.400,00		57.619.400,00
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD								
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Laporan	1 Laporan	567.100.000,00	231.739.200,00	146.597.927,36		606.797.000,00
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	603.975.000,00	356.671.075,00	356.671.075,00		1.255.000.000,00
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah								

						Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	23.975.000,00	0,00	0,00		25.000.000,00
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi								
					Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	580.000.000,00	356.671.075,00	447.029.224,36		1.230.000.000,00	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	11 Dokumen	11 Dokumen	8.920.250.000,00	3.915.338.000,00	3.915.338.000,00		10.543.301.250,00
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3.331.250.000,00	965.736.000,00	1.020.984.663,80		3.414.531.250,00	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	13.696.640,00		25.375.000,00	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah								
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.385.800.000,00	366.812.500,00	338.929.747,40		1.385.800.000,00	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.631.800.000,00	806.389.500,00	900.934.862,60		1.672.595.000,00	
4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus								
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 Dokumen	5 Dokumen	2.545.000.000,00	1.750.000.000,00	1.178.410.419,00		4.045.000.000,00	
J U M L A H									112.191.128.763,00	64.433.630.685,84	56.368.636.799,87		106.245.174.634,00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing bagian, di mana Renja ini disusun dengan memperhatikan kondisi objektif baik menyangkut kompetensi personal, kemampuan anggaran, kewenangan yang dimiliki serta situasi yang terjadi. Sehubungan dengan itu maka semua unit kerja (bagian) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Dumai diharapkan dapat mempedomani Renja ini.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat tergantung kepada komitmen yang telah disepakati serta konsisten dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga sasaran program pembangunan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

B. SARAN

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik internal maupun eksternal.
2. Menambah personil Sekretariat DPRD terutama yang kompeten dalam perencanaan dan program.
3. Meningkatkan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD dengan mengikutsertakan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Dumai, Juli 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

HADIYONO,S.Hut,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710605 199903 1 013

Perubahan Renja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

